

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Dewita Sabrina

Program Magister Manajemen, Pascasarjana IIB Darmajaya
Bandar Lampung, Indonesia
(dewitasabrina@gmail.com)

ABSTRACT

Efficiency and Effectiveness Analysis of Direct Expenditure Budget Realization Report at the State Islamic University Raden Intan Lampung

The budget is the planned costs before the details of the activities carried out, and its use should be accountable to its stakeholders by reporting the results of spending from the budget (expenditure budget realization report). With the report can be obtained from portrayal of the financial performance results in related institutions, efficiently and effectively, to be evaluated and improved in the period of the next year. Therefore, this study aims to analyze the level of efficiency and effectiveness of budget expenditure realization, especially in direct expenditure based on criteria standards according to Kepmendagri No. 690,900,327 in 1996, as well as determining variance value criteria, and the growth of direct expenditure budget realization at the State Islamic University Raden Intan Lampung in 2013-2017. Method used is quantitative with a descriptive approach, through interview techniques to obtain actual data, namely; report realization of direct expenditure budget in 2013-2017.

The results of the research show that the absorption of direct expenditure budget has met the efficient criteria, meaning that State Islamic University Raden Intan Lampung has been able to use the minimum budget to achieve optimal realization. Effectiveness level in 2013-2016 has fulfilled the effective criteria, but in 2017 the inefficiency criteria, meaning that the realization of the budget obtained does not reach the planned target. Results of the analysis of variance (difference) between direct expenditure and realization of 2013-2017 has reached the criteria of "good", meaning that of direct expenditure budget realization doesn't exceed the budget. And then results of the growth rate of Direct Expenditure Budget Realization at the State Islamic University Raden Intan Lampung in 2013-2017 shows a fluctuating growth rate, because the amount of the budget and the number of activities that have decreased and increased for 5 (five) years.

Keywords: Efficiency, Effectiveness, Variance and Growth of Direct Expenditure Budget Realization

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, anggaran merupakan pernyataan mengenai apa yang diharapkan dan direncanakan dalam periode tertentu di masa yang akan datang. Optimalisasi anggaran harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*) dalam rangka pertanggungjawaban publik (Kennedy, (1979) dalam Danepo (2013)). Sedangkan menurut Herbert (1987) dalam Hisyam (2012), menjelaskan bahwa anggaran merupakan sebuah pernyataan keuangan secara tertulis yang dibuat oleh pemerintah dan terdiri atas sejumlah pendapatan yang dapat diantisipasi/diperkirakan akan diterima, program/ kegiatan yang telah disetujui untuk dilaksanakan, disertai dengan alokasi belanja untuk menjalankan kegiatan tersebut dalam suatu periode tertentu. Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga

berfungsi sebagai alat akuntabilitas publik, penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari pembelanjaan dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi yang bersangkutan.

Anggaran memiliki berbagai macam jenis anggaran seperti anggaran penjualan, anggaran belanja, anggaran produksi, dan lain-lain. Penyusunan anggaran pada umumnya melewati beberapa tahap anggaran yaitu persiapan, ratifikasi, implementasi, evaluasi dan pelaporan (Yuliantoro dalam Andrianto, 2015). Pelaporan anggaran meliputi pada saat anggaran disusun (laporan anggaran) maupun sesudah anggaran terlaksana (laporan realisasi anggaran). Berdasarkan PP No.71 tahun 2010, manfaat laporan realisasi anggaran yaitu menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi transfer,

surplus/defisit dan realisasi pembiayaan dari satu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran, dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi penggunaan anggaran yang efisien dan efektif. Faqihudin (2011) menjelaskan bahwa efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak absolut, tetapi relatif. Lain halnya pada efektivitas, Lubis dan Huseini (1987:55) dalam Reski (2012), menyatakan bahwa efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. arti kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Penelitian mengenai efisiensi dan efektivitas realisasi anggaran belanja telah banyak dilakukan di berbagai instansi pemerintah daerah di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Tamasoleng (2015), yang meneliti tentang Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Provinsi Sulawesi Utara, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran untuk waktu 5 (lima) tahun paling banyak terjadi di triwulan IV atau akhir tahun, penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas SKPD kurang merata, akibatnya ketidakseimbangan kinerja SKPD kurang maksimal karena menumpuk di akhir tahun. Sedangkan penelitian lain dilakukan oleh Julita (2015), tentang Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa; berdasarkan analisis varians secara umum dapat dikatakan sudah baik dan berdasarkan rasio efektivitas dan rasio efisiensi menunjukkan kinerja instansinya dinilai sangat efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran belanja. Dari beberapa penelitian tersebut tentunya mempunyai kondisi yang berbeda jika dibandingkan dengan pengalokasian dana anggaran di instansi pemerintah pada sektor

pelayanan dan jasa di bidang pendidikan, khususnya pada perguruan tinggi negeri.

Pasal 48 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”. Transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan pendidikan maksudnya tidak harus semua terbuka tetapi ada beberapa hal yang hanya diketahui oleh beberapa pimpinan saja dengan tujuan untuk menghindari kecurigaan. Dalam rangka keterbukaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi perlu diinformasikan kepada *stakeholders*, agar dana yang digunakan tepat sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatannya, seberapa besarnya dana yang dibutuhkan dan sasaran yang ingin dicapainya. Melalui keterbukaan ini diharapkan instansi dapat lebih bertanggungjawab dan lebih berkomitmen dalam menyelesaikan program dan kegiatan yang telah diurusnya, sehingga *stakeholders* dapat mengetahui secara rinci dana yang dibutuhkan dan dana yang sudah digunakan oleh instansi tersebut, guna untuk evaluasi perkembangan kinerja instansi agar dapat ditingkatkan di periode anggaran berikutnya. Banyak organisasi ataupun lembaga pendidikan yang tidak mampu bertahan akibat pengelolaan manajemen dan pengelolaan keuangan yang kurang tepat atau bahkan tidak benar. Adanya perencanaan keuangan yang tidak didukung oleh data dan laporan yang tepat serta disesuaikan dengan kebutuhan, dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan yang terjadi adalah penumpukan aktivitas belanja di akhir periode anggaran guna untuk menghabiskan dana anggaran. Oleh sebab itu, berkaitan langsung dengan dana anggaran yang diperoleh dari *stakeholder* selaku pemberi dana anggaran, instansi harus mengoptimalkan anggaran belanja serta realisasinya secara efisien dan efektif.

Tingkat efisiensi, tingkat efektivitas, kriteria berdasarkan nilai varians, dan tingkat pertumbuhan anggaran belanja langsung merupakan hal yang sangat penting dalam mengukur pelaksanaan anggaran belanja khususnya belanja langsung, karena belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh sebab itu secara keseluruhan dapat dianalisis dan digunakan sebagai koreksi atau evaluasi terhadap penyerapan anggaran belanja langsung untuk periode berikutnya, yang dapat dilakukan disebuah instansi pemerintah pada

sektor pelayanan dan jasa dibidang pendidikan tinggi negeri. Hasil dari analisis realisasi anggaran belanja langsung dapat menentukan baik atau tidaknya dalam merealisasikan anggaran belanja langsung, serta dapat menentukan realisasi anggaran belanja langsung telah dialokasikan secara efektif, efisien dan mengalami pertumbuhan atau bahkan sebaliknya. Organisasi dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika tingkat efisiensinya kurang dari 80%. Sebaliknya jika melebihi 80% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010:166). Sedangkan tingkat efektivitas dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja (Mardiasmo, 2013:132). Dengan menggunakan standar efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan, dapat diketahui efisien atau tidaknya anggaran belanja langsung pada sebuah instansi pemerintah, apabila tingkat efisiensi pengelolaan anggaran belanja langsung mencapai persentase dibawah 80%, maka dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran belanja langsung pada instansi tersebut telah mencapai kriteria efisien, dan sebaliknya jika diatas 80% masuk dalam kriteria tidak efisien. Tingkat efektivitas juga mempunyai standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan, anggaran belanja langsung pada sebuah instansi pemerintah dapat diketahui efektif dengan memenuhi kriteria penilaian diatas 90%, apabila persentase tingkat efektivitas dibawah 90% maka anggaran belanja langsung masuk dalam kriteria tidak efektif.

Instansi pemerintah pada sektor pelayanan dan jasa dibidang pendidikan, yaitu di perguruan tinggi negeri di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, meliputi; perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia, perguruan tinggi Islam negeri yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama, dan Perguruan tinggi kedinasan yang bernaung di bawah kementerian/LPNK tertentu. Penelitian ini cenderung meneliti pada salah satu perguruan tinggi Islam negeri yang terbesar di provinsi Lampung yaitu; Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pemilihan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai objek penelitian ini didasarkan dari segi perkembangan fasilitasnya yang begitu pesat, serta diikuti dengan penambahan fakultas-fakultas baru. Universitas

Islam Negeri Raden Intan Lampung merupakan institusi pendidikan yang berlandaskan Islam, dengan jenjang pendidikan strata 1, 2, dan 3, yang beralamatkan di Jalan Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Kecamatan Sukarame dan Jalan Yulius Usman No.20, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Pada bulan April 2017 mengalami perubahan status dari Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sebelum perubahan status tersebut, lebih dahulu mengalami perubahan menjadi Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pelayanan keuangan yakni Badan Layanan Umum (BLU), yang memberikan konsekuensi terhadap iklim kerja pada instansi tersebut.

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Santoso (2011) yang berjudul Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi, dari tahun 2005-2010. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu instansi pemerintah sektor pelayanan dan jasa dibidang pendidikan tinggi dan tahun penelitian yaitu tahun 2013-2017. Agar tujuan dapat tercapai secara maksimal, setiap organisasi maupun institusi pendidikan membutuhkan perencanaan untuk mengendalikan anggaran yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan, serta dapat dipertanggung-jawabkan kepada *stakeholder* atau pemerintah selaku pemberi dana anggaran. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja, sebab sejauh ini hanya menampilkan target anggaran belanja, anggaran belanja yang diperoleh, realisasi anggaran belanja (yang telah dilaksanakan) dan sisa dana anggaran yang tidak terealisasi didalam laporan realisasi anggaran belanja tersebut, tanpa menganalisis dan mengetahui tingkat efisiensi, tingkat efektivitas, menentukan kriteria nilai varians, maupun tingkat pertumbuhan realisasi anggaran belanja dari tahun ke tahun guna untuk melihat perkembangan pengelolaan anggaran terutama dari periode sebelum menjadi universitas hingga setelah menjadi universitas, yang dapat dilihat dan dianalisis berdasarkan pada laporan realisasi anggaran belanja langsung yang terdapat di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

LANDASAN TEORI

Grand Theory (Anggaran)

Pengertian anggaran menurut Lee, Jr. dan Johnson (1998) dalam penelitian Permana (2012); “A budget is a document or a collection of document that refers to the financial condition of an organization, including information on revenues, expenditures, activities, and purposes or goals, a budget is prospective referring to anticipate future revenues, expenditures, and accomplishments”, yang artinya; Anggaran adalah dokumen atau kumpulan dokumen yang mengacu pada kondisi keuangan suatu organisasi, termasuk informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas, dan tujuan atau tujuan, anggaran adalah prospektif yang mengacu untuk mengantisipasi pendapatan, pengeluaran, dan hasil usaha di masa mendatang. Sedangkan pengertian lain menurut Poerwanto (2017), Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Anggaran juga adalah suatu rencana kuantitatif periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi.

Anggaran memiliki peranan penting dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Menyusun anggaran dari setiap program organisasi dapat menjadi tugas yang cukup berat dan membebani. Namun demikian, hal ini sangat penting bagi suatu organisasi yang merupakan cara untuk merencanakan dan memastikan bahwa sebuah organisasi telah mengalokasikan sumber dayanya dengan baik (Pangkey dan Pinatik, 2015). Oleh sebab itu, Anggaran merupakan rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling berpengaruh satu sama lain (Julita, 2015). Sedangkan Sinambela (2014), menjelaskan bahwa Anggaran adalah pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu alat manajemen dalam bentuk estimasi kinerja berupa rencana kerja keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Tujuannya dalam penyusunan anggaran adalah agar setiap kegiatan yang disertai dengan biaya-biaya dapat sesuai dengan rencana yang telah dibuat secara efisien dan efektif.

Permasalahan umum dalam perencanaan anggaran :

1. Anggaran belanja cenderung ditetapkan lebih tinggi. Karena apabila usulan belanja selalu wajar dan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya, maka urgensi dan relevansi analisis standar belanja menjadi rendah.
2. Anggaran pendapatan cenderung ditetapkan lebih rendah bila usulan belanja cenderung di *mark-up*, sebaliknya usulan pendapatan atau penerimaan cenderung di *mark-down*; ditetapkan lebih rendah dari target sebenarnya.
3. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran.
4. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan antar perangkat kerja instansi. Hal ini perlu diperhatikan karena target capaian program atau target hasil (*outcome*) sebuah kegiatan dapat dicapai melalui sinergi program dan kegiatan antar perangkat kerja instansi. (Manik, et al. 2008).

Karakteristik Anggaran

1. Anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis.
2. Anggaran dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non moneter.
3. Mencakup periode satu tahun.
4. Anggaran merupakan komitmen manajemen; manajer sepakat untuk mengemban tanggungjawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan.
5. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi daripada oleh pihak yang menganggarkan.

6. Begitu disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi yang ditetapkan.
7. Secara berkala, kinerja finansial sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan (Murdayanti, 2017;3).

Dari beberapa karakteristik diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Anggaran juga berisi komitmen manajemen yang berarti para manajer setuju untuk menerima tanggung-jawab agar mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.

Manfaat Anggaran

- 1) Dalam bidang perencanaan
 - a) Anggaran bermanfaat untuk membantu manajer meneliti, mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan.
 - b) Mengerahkan seluruh tenaga dalam perusahaan dalam menentukan arah/kegiatan yang paling menguntungkan. Anggaran yang disusun untuk waktu panjang, akan sangat membantu dalam mengerahkan secara tepat tenaga-tenaga kepala bagian, salesman, kepala cabang dan semua tenaga operasional.
 - c) Untuk membantu atau menunjang kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan/instansi.
 - d) Menentukan tujuan-tujuan perusahaan/instansi. Manajemen yang dapat menentukan tujuannya secara jelas dan logis (dapat dilaksanakan) adalah manajemen yang akan berhasil. Penentuan tujuan ini dibatasi oleh beberapa faktor. Anggaran dapat membantu manajemen dalam memilih : mana tujuan yang dapat dilaksanakan dan mana yang tidak.
- 2) Dalam bidang koordinasi
 - a) Membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan/instansi. Penyusunan rencana yang terperinci (berupa anggaran) membantu manajer mengatasi masalah itu, sehingga ia kembali merasa adanya hubungan antara kemampuannya dengan perusahaan/instansi yang dipimpinya.
 - b) Menghubungkan aktivitas perusahaan dengan *trend* dalam dunia usaha. Dengan disusunnya anggaran, dapat dinilai apakah rencana tersebut sesuai dengan keadaan dunia usaha yang akan dihadapi.
 - c) Menempatkan penggunaan modal pada saluran-saluran yang menguntungkan, dalam arti seimbang dengan program-

program perusahaan/instansi. Sebelum membelanjakan uangnya, perusahaan/instansi harus mempelajari terlebih dahulu saluran-saluran mana yang paling menguntungkan atau yang paling sesuai dengan program perusahaan/instansi.

- d) Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi. Setelah rencana yang baik disusun dan kemudian dijalankan. Kelemahan-kelemahan dapat dilihat untuk kemudian diperbaiki.
- 3) Dalam bidang pengawasan
 - a) Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran. Tujuan utama dari perencanaan adalah memilih kegiatan yang paling menguntungkan. Kegiatan tersebut tidak hanya direncanakan saja, tetapi di dalam peleksanaannya harus diadakan pengawasan agar betul-betul seperti yang direncanakan. Beberapa kegiatan dan pengeluaran sangat perlu diawasi.

Untuk pencegahan secara umum pemborosan-pemborosan, sebetulnya ini adalah tujuan yang paling umum daripada penyusunan anggaran. Kontrol terhadap pelaksanaan diharapkan dapat mengurangi pemborosan-pemborosan (Murdayanti, 2017;4).

Prinsip-prinsip Anggaran

Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip anggaran adalah (Nordawan dan Hertati, 2010) :

- a) Transparansi dan akuntabilitas anggaran. Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan
- b) Disiplin anggaran. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- c) Keadilan anggaran. Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena pendapatan pemerintah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.
- d) Efisiensi dan efektivitas anggaran. Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Selain prinsip-prinsip secara umum seperti yang telah diuraikan di atas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengamanatkan perubahan-perubahan kunci tentang penganggaran sebagai berikut:

- a) Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah.
- b) Penerapan penganggaran secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.
- c) Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.

Kelebihan Anggaran

- 1) Internal : analisis data historis sebagai landasan program kerja dimasa mendatang.
- 2) Eksternal : peluang bisnis dan kendala yang dihadapi
- 3) Alat pedoman kerja, pengendalian operasional dan keuangan
- 4) Sarana koordinasi
- 5) Sumber rasa tanggungjawab dan partisipasi aktif
- 6) Dasar untuk mengetahui wewenang dan tanggungjawab semua level manajer

Kelemahan Anggaran

- a) Prediksi kegiatan belum tentu tepat
- b) Perubahan konflik politik, sosial, ekonomi, bisnis sulit diprediksi
- c) Sering terjadi konflik kepentingan
- d) Pembuat anggaran berpikir subyektif
- e) Idealistik yang mengakibatkan sulit dicapai (Murdayanti, 2017;10).

Klasifikasi Anggaran

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Klasifikasi anggaran yang disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja.

- 1) Klasifikasi organisasi mengelompokkan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi K/L, yaitu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- 2) Klasifikasi fungsi terdiri dari fungsi dan subfungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, sedangkan Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut/lebih detail dari deskripsi fungsi. Subfungsi terdiri atas kumpulan program dan program terdiri atas kumpulan kegiatan.
- 3) Klasifikasi jenis belanja atau klasifikasi menurut ekonomi, dalam klasifikasi belanja digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban / pelaporan anggaran. Namun penggunaan jenis belanja dalam dokumen tersebut mempunyai tujuan berbeda. Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L, tujuan penggunaan jenis belanja dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran ke dalam jenis-jenis belanja.

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau di catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Permasalahan belanja ada 4, yaitu :

- 1) Efisiensi; Kalau berbicara mengenai efisiensi, maka tolak-ukurnya adalah *cost and benefit*.
- 2) Penyerapan yang hampir terjadi setiap tahun menumpuk pada akhir tahun. Apabila ini terjadi maka dapat dipastikan bahwa kualitas belanja tidak optimal dan kurang mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi.
- 3) Penyerapan anggaran yang kurang optimal, dan masih kurang berorientasi kepada output.
- 4) Dengan penyempurnaan regulasi, diharapkan mampu mengurangi masalah-masalah belanja disektor instansi pemerintah (*depkeu.go.id*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 36 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja menurut kelompok dibedakan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari;

a) Belanja pegawai

Belanja pegawai dalam kelompok belanja langsung tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan (honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian / pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa).

b) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/ material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

c) Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Sedangkan pengertian lain dari belanja langsung yaitu besar kecilnya belanja dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan, semakin banyak volume kegiatan maka akan semakin meningkat belanjanya, keberadaan anggaran belanja langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan (Anggarini dan Puranto, 2010). Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan *ouput* yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan (Sundari, 2013).

Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari; (1) Belanja pegawai seperti belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. (3) Subsidi adalah pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui perusahaan negara dan/atau perusahaan swasta. (4) Hibah adalah pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang/ barang/jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, Pemda, atau kepada perusahaan negara/daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali dan tidak terus menerus, yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan Pemda dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diteruskan-hibahkan ke daerah. (5) Bantuan sosial. (6) Belanja bagi hasil. (7) Bantuan keuangan. (8) Belanja tidak terduga seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan ditahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Badan Layanan Umum (BLU)

Berdasarkan ketentuan umum pada pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 butir (23) tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait. Pendekatan penganggaran yang demikian sangat diperlukan bagi satuan kerja instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada publik. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah. Dalam pasal 68 dan pasal 69 dari undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Instansi demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). BLU juga menjadi salah satu produk reformasi pengelolaan keuangan Negara, yang salah satunya adalah terjadi pergeseran dari penganggaran tradisional yang sekedar membiayai masukan (*input*) atau proses ke penganggaran berbasis kinerja yang memperhatikan apa yang akan dihasilkan (*output*).

Perguruan tinggi negeri juga tidak terlepas dari kewajiban untuk meningkatkan pelayanan. Oleh karena itu sebagai bagian dari pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, perguruan tinggi negeri juga dapat memperoleh perubahan status menjadi Badan Layanan Umum. Perguruan tinggi negeri yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum menciptakan sistem pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri yang lebih fleksibel. Perubahan sistem akuntansi ini mencakup perubahan dari *traditional budgeting* menjadi *performance based budgeting* dan dari *cash basis* menjadi *accrual basis*. Penilaian kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Sebelum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.05/2010 tentang penetapan Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Sehingga pihak Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung perlu dan diwajibkan untuk menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dan mempertanggung-jawabkan aktivitas dari anggaran belanja kepada *stakeholder* (Pemerintah selaku pemberi dana anggaran).

Analisis Efisiensi

Efisiensi dapat dilaksanakan di semua instansi pemerintah, termasuk dalam bidang pendidikan, terutama dalam penyelenggaraan program dan kegiatannya, sebab dana anggaran yang diperoleh sangat terbatas. Efisiensi selalu membandingkan dua hal, yaitu masukan dengan keluaran. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara masukan dan keluaran, efisiensi itu merupakan ukuran apakah penggunaan barang atau jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi pemerintah dapat mencapai manfaat tertentu. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien, apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya, dan dana yang serendah-rendahnya. Definisi lain mengenai efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (*input*) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma (Julita, 2015). Sedangkan menurut Raharjo (2011:169), mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan kemampuan suatu organisasi dalam menjalankan dan menyelesaikan setiap aktivitasnya dengan baik dan benar, guna memperoleh hasil yang diinginkan dengan menggunakan komponen input yang serendah-rendahnya, seperti waktu, tenaga dan juga biaya yang dapat dihitung penggunaannya agar tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti, dan untuk menghasilkan output yang optimal.

Analisis Efektivitas

Menurut Georgopolous dan Tannenbaum dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Organisasi (1985:50) yang dikutip dalam penelitian Reski (2012), mengemukakan bahwa: "Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan

saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan". Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk, atau manajemen organisasi. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*) maupun keluaran (*output*). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program/kegiatan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*) (Mahmudi, 2015:86). Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu di catat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah di keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah di anggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah di tetapkan (Mardiasmo, 2004:134).

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang di diharapkan (target dana anggaran) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai (dana anggaran yang diterima). Sehingga hasil dari perbandingan tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dari sebuah anggaran, semakin mendekati angka satu (100%) semakin baik efektivitasnya. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (*outcome*).

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan target anggaran belanja langsung Mardiasmo (2013:132).

Varians Belanja

Varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentase. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: 1) Selisih wajar (*favourable variance*) dan 2) selisih tidak wajar (*unfavourable variance*). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut *favourable variance*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan *unfavourable variance*. Mahmudi (2010: 157). Penyerapan anggaran yang terlalu rendah tidak baik karena mengindikasikan kelemahan dalam perencanaan anggaran, namun dengan tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan agar tidak ada pemborosan anggaran sehingga lebih efisien (Mahmudi, 2010:159)

Manfaat varians anggaran belanja yaitu:

- a) Untuk menyelidiki varians antara hasil sesungguhnya pada periode berjalan dan sebelumnya.
- b) Untuk menyelidiki varians antara hasil sesungguhnya dan biaya standar.
- c) Untuk menyelidiki varians hasil sesungguhnya dengan tujuan yang direncanakan.

Keterbatasan analisis varians:

- a) Walaupun analisis ini mengidentifikasi dimana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya.
- b) Menentukan apakah suatu varians adalah signifikan.
- c) Ketika laporan kinerja menjadi teragregasi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya.
- d) Ketika varians menjadi semakin teragregasi, para manajer menjadi semakin bergantung pada penjelasan-penjelasan dan prediksi yang menyertainya.

Pertumbuhan Belanja Langsung

Menurut Mahmudi (2011:162) pertumbuhan belanja adalah kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan selain untuk menilai pos belanja dapat pula digunakan untuk menilai pertumbuhan aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan sebagainya. Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun yang bernilai positif atau negatif dan pada umumnya belanja

memiliki kecenderungan selalu naik. Menurut Mahmudi (2010: 160) realisasi belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik setiap tahun, alasan kenaikan realisasi belanja bisa dikaitkan dengan adanya inflasi, perubahan kurs rupiah, dan penyesuaian faktor ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang. Analisis pertumbuhan belanja perlu untuk dinilai guna mengetahui besarnya pertumbuhan masing-masing belanja dari tahun ketahun.

Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi merupakan proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan (Nordawan, 2010:115). Realisasi anggaran berguna untuk memberikan suatu informasi-informasi yang penting dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. Realisasi anggaran dapat digambarkan seperti serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola dan dapat diukur dalam satuan rupiah, yang dapat disusun berdasarkan klasifikasi tertentu secara sistematis dalam satu periode anggaran.

Laporan realisasi anggaran/laporan operasional keuangan, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja (Restianto dan Bawono, 2015:13). Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan/instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan/instansi. Laporan realisasi anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan (Dien, et.al, 2015). Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran adalah suatu informasi dalam bentuk laporan, berupa serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola pada satu periode pelaporan anggaran.

Berdasarkan PP No.71 tahun 2010, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahan pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara

anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Struktur laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi tentang; Pendapatan (basis kas dan basis akrual), Belanja (basis kas dan basis akrual), Transfer, Surplus atau Defisit, Pembiayaan (*Financing*).

Manfaat informasi realisasi anggaran yaitu menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi transfer, surplus/defisit dan realisasi pembiayaan dari satu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Penelitian Terdahulu

Pada penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini rata-rata menggunakan objek penelitian disuatu daerah yang luas wilayah cakupannya, sedangkan pada penelitian ini hanya terfokus pada satu objek penelitian yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh sebab itu, sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan dalam penelitian tentang analisis efisiensi dan efektivitas laporan realisasi anggaran belanja langsung pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, maka dalam penulisan ini akan mencantumkan penelitian terdahulu yang terangkum sebagai berikut:

Santoso (2011) melakukan penelitian tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Ngawi. Metode penelitian deskriptif dan bersifat studi kasus yang dikaji secara kuantitatif. Jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif. Berdasarkan perhitungan dengan formulasi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Ngawi, rata-rata tingkat efisiensi masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih boros dalam menggunakan anggarannya. Sedangkan pada tingkat efektivitas sudah efektif, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang menunjukkan angka lebih dari 90%.

Tamasoleng (2015) melakukan penelitian yang menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian deskriptif, dan data diolah dengan analisis deskripsi isi (*contents analysis*) yaitu; pengumpulan data, reduksi data dan kategori, menyajikan data, serta, menarik kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran ditahun 2009-2013 rata-rata 87,06%, di akhir tahun. Penyerapan anggaran berdasarkan anggaran kas SKPD kurang merata. Ketidakseimbangan penyerapan anggaran pertriwulan ini mengakibatkan kinerja SKPD kurang maksimal karena menumpuk di akhir tahun. Kegiatan, pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban sampai dengan evaluasi kinerja, belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan teori anggaran berbasis kinerja.

Julita (2015) melakukan penelitian yang menganalisis efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Lingkungan Hidup provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif. Kinerja pendapatan badan lingkungan hidup provinsi Sumatera Utara berdasarkan analisis varians secara umum dapat dikatakan sudah baik. Berdasarkan rasio efektivitas dan rasio efisiensi menunjukkan kinerja badan lingkungan hidup provinsi Sumatera Utara dinilai sangat efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran belanja.

Trianto (2014) melakukan penelitian yang menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelola keuangan daerah di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan data sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, rata-rata nilai rasio efektivitas keuangan daerah Kota Palembang periode tahun 2003-2013 mencapai tingkat yang efektif. Sedangkan tingkat efisiensinya rata-rata berada pada tingkat kurang efisien dan tidak efisien.

Azmi, dan Jusmani (2016) melakukan penelitian yang menganalisis efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Tingkat efektifitas anggaran belanja ditahun 2013 cukup efektif, ditahun 2014 tingkat efektifitas mengalami penurunan namun masih cukup efektif, dan ditahun 2015 kurang efektif, karena

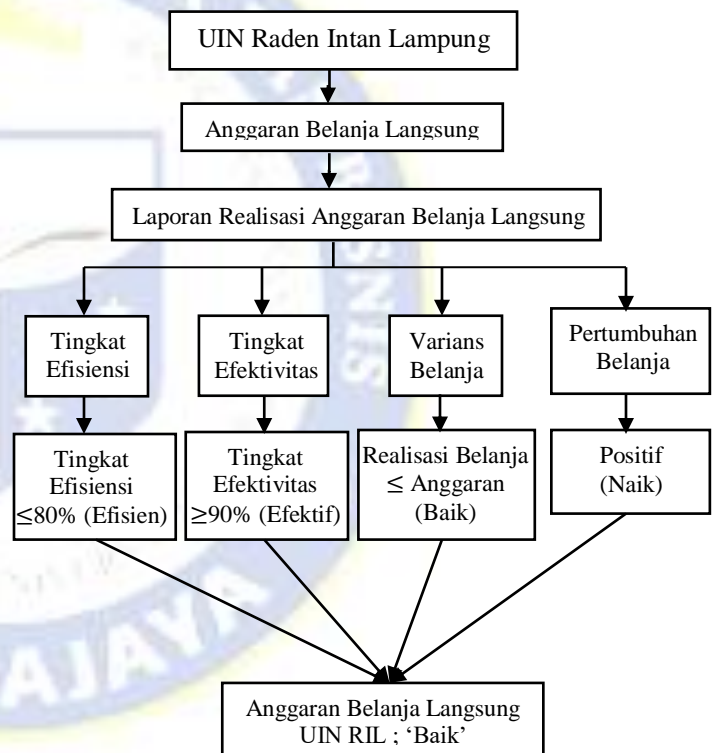
capaian PAD tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan dan juga ada beberapa Program/Kegiatan yang dibatalkan.

Kerangka Berpikir

Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri (penelitian deskriptif), maka yang dilakukan oleh peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Lingkup dalam penelitian ini mencakupsuatu proses yang menganalisis laporan realisasi anggaran belanja langsung pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan menghitung dan mengetahui penilaian tingkat efisiensi dan efektivitas.

Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun seperti dalam bagan berikut ini:



METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif. penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan suatu masalah yang berupa fakta atau kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka menentukan dan menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas melalui laporan realisasi anggaran belanja langsung.

Objek dalam penelitian ini adalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang bertempat di Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame,

Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran belanja langsung.

Sumber data dalam penulisan ini yaitu dengan data primer yaitu dengan datang langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data laporan realisasi anggaran belanja langsung yang relevan khususnya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Serta dengan data sekunder, seperti buku-buku mengenai teori-teori perpustakaan, dan buku-buku sejenis lainnya yang berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas laporan realisasi anggaran belanja langsung. Data sekunder juga didapatkan di tempat penulis melakukan penelitian, data yang didapat berupa gambaran umum tempat penelitian, yaitu gambaran umum tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif atau menggunakan rumus pada umumnya. Berikut analisis data yang digunakan:

Analisis Efisiensi

Tingkat efisiensi ini berguna untuk mengukur tingkat penghematan anggaran. Organisasi dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika tingkat efisiensinya kurang dari 80%. Sebaliknya jika melebihi 80% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010:166). Perhitungan efisiensi belanja adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Anggaran belanja Langsung}} \times 100\%$$

Standar efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut:

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
- Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan laporan realisasi anggaran. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan target anggaran belanja langsung (Mardiasmo, 2013:132) adapun rumusnya yaitu :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Target Anggaran Belanja Langsung}} \times 100\%$$

Standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut:

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
- Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif;
- Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
- Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
- Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Analisis Varians

Analisis varians dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat selisih yang terjadi pada tahun 2013-2017, apakah realisasi belanja langsung lebih kecil dari anggaran belanja langsung (*favourable variance*) atau realisasi belanja langsung lebih besar dari anggaran belanja langsung (*unfavourable variance*) Mahmudi, (2010:156). Analisis varians belanja langsung dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010:157):

$$\text{Varians} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Jika terdapat selisih lebih (realisasi belanja langsung melebihi jumlah yang bersangkutan) maka dikatakan pengelolaan keuangan belanja langsung memiliki kriteria tidak baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja langsung kurang dari jumlah yang dianggarkan) maka pengelolaan keuangan belanja langsung dapat dinilai baik.

Analisis Pertumbuhan

Analisis Pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja pertahun, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertumbuhan realisasi belanja langsung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2010:160):

$$\text{Pertumbuhan realisasi belanja thn } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1} \times 100\%$$

Keterangan :

Realisasi t – Realisasi t-1 = Realisasi tahun yang dikurangi tahun sebelumnya.

Realisasi t-1 = Realisasi tahun sebelumnya

100% = Persentase

Kriteria penilaian kinerja adalah sebagai berikut :

Keterangan :

- Apabila pertumbuhan mengalami kenaikan, maka nilai pertumbuhan menjadi positif.
- Sedangkan apabila pertumbuhan mengalami penurunan, maka nilai pertumbuhan menjadi negatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan hasil perhitungan yang dapat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berdasarkan data keuangan dari laporan realisasi anggaran belanja langsung.

Analisis Efisiensi

Dengan berpedoman pada standar efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria. Maka dibawah ini disajikan tabel perhitungan efisiensi belanja langsung Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk tahun anggaran 2013-2017 berdasarkan laporan realisasi anggaran;

Perhitungan tingkat efisiensi tahun 2013-2017:

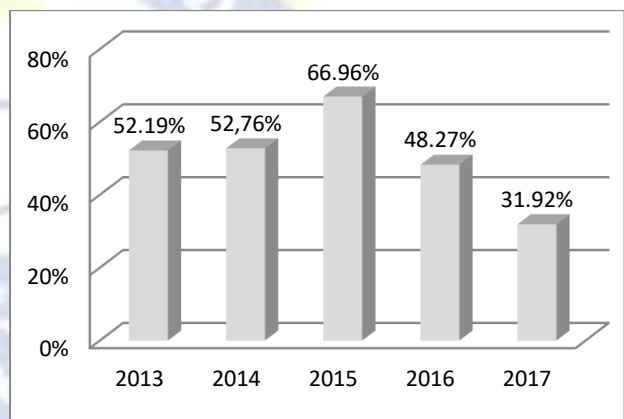
Tahun	Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Belanja Langsung	Perhitungan	Tingkat Efisiensi	Ukuran	Kriteria
2013	196.014.357.350	102.291.497.071	$\frac{102.291.497.071}{196.014.357.350} \times 100\%$	52%	≤ 80%	Efisien
2014	183.874.560.000	97.010.557.946	$\frac{97.010.557.946}{183.874.560.000} \times 100\%$	53%	≤ 80%	Efisien
2015	287.801.575.000	200.754.003.800	$\frac{200.754.003.800}{287.801.575.000} \times 100\%$	67%	≤ 80%	Efisien
2016	384.424.694.000	185.558.536.569	$\frac{185.558.536.569}{384.424.694.000} \times 100\%$	48%	≤ 80%	Efisien
2017	297.580.474.000	94.989.098.992	$\frac{94.989.098.992}{297.580.474.000} \times 100\%$	32%	≤ 80%	Efisien
			Rata-Rata	50%	≤ 80%	Efisien

Sumber: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2013-2017).(Data Diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, tahun 2013 menunjukkan tingkat

efisiensi sebesar 52% atau dalam kriteria efisien (≤80%), di tahun 2014 jumlah persentasenya sebesar 53% dengan kriteria efisien (≤80%), tahun 2015 jumlahnya persentasenya semakin meningkat yaitu 67% atau masih dalam kriteria efisien (≤80%), namun dengan jumlah persentase tersebut nilainya telah mendekati batas kriteria efisiensi yaitu 80%. Kemudian di tahun 2016 jumlah persentasenya kembali membaik yaitu sebesar 48% dengan kriteria efisien (≤80%), Sedangkan di tahun 2017 jumlah persentasenya sebesar 32%, jumlah persentase ini juga menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, tahun 2015, tahun 2014, dan tahun 2013. Berikut ini merupakan tingkat efisiensi anggaran belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dapat digambarkan dalam bentuk grafik, yaitu;

Grafik Efisiensi Belanja Langsung:



Sumber: Data Diolah (2018)

Grafik efisiensi belanja langsung menunjukkan adanya pergerakan tingkat efisiensi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam merealisasikan anggaran belanja langsung, dan menggambarkan bahwa tingkat efisiensi dari tahun 2013 sampai tahun 2017 tingkat efisiensi belanja langsung dengan nilai rata-rata mencapai 50% atau dapat dinilai telah mencapai kriteria efisien, sebab nilai presentase dari kriteria efisiensi yaitu ≤80%.

Analisis Efektivitas

Dengan berpedoman pada standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang penilaian dan pencapaian kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria. Maka dibawah ini merupakan sajian tabel perhitungan efektivitas belanja langsung Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk tahun anggaran 2013-2017 berdasarkan laporan realisasi anggaran;

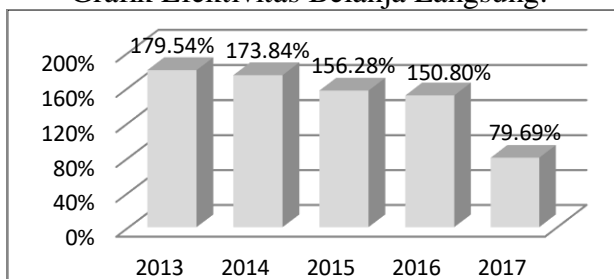
Perhitungan tingkat efektivitas tahun 2013-2017:

Tahun	Target Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Perhitungan	Tingkat Efektivitas	Ukuran	Kriteria
2013	109.178.145.000	196.014.357.350	$\frac{196.014.357.350}{109.178.145.000} \times 100\%$	180%	≥ 90%	Efektif
2014	105.775.122.000	183.874.560.000	$\frac{183.874.560.000}{105.775.122.000} \times 100\%$	174%	≥ 90%	Efektif
2015	191.837.024.000	299.801.575.000	$\frac{299.801.575.000}{191.837.024.000} \times 100\%$	156%	≥ 90%	Efektif
2016	254.928.668.000	384.424.694.000	$\frac{384.424.694.000}{254.928.668.000} \times 100\%$	151%	≥ 90%	Efektif
2017	373.436.984.000	297.580.474.000	$\frac{297.580.474.000}{373.436.984.000} \times 100\%$	80%	≥ 90%	Kurang Efektif
			Rata-rata	148%	≥ 90%	Efektif

Sumber: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2013-2017). (Data Diolah)

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, telah menunjukkan bahwa target anggaran belanja langsung dan anggaran belanja langsung yang diperoleh hasil persentase untuk tahun 2013 mencapai 180%, dengan kriteria efektif (≥90%). Persentase tahun 2014 terjadi peningkatan mencapai 174%, dengan kriteria efektif (≥90%). Kemudian persentase tahun 2015 menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 156%, dengan kriteria efektif (≥90%). Selanjutnya persentase ditahun 2016 kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 151%, dengan kriteria efektif (≥90%). Sedangkan hasil persentase ditahun 2017 hanya sebesar 80% dengan kriteria kurang efektif, disebabkan karena hasil persentase tersebut tidak mencapai kriteria tingkat efektivitas yaitu ≥90%, hal ini dikarenakan selisih antara target anggaran yang lebih besar daripada anggaran yang diperoleh, yaitu sebesar Rp. 75.856.510.000,-. Namun dari keseluruhan, hasil yang dicapai oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam mewujudkan target anggaran belanja langsung yang terealisasi atau tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja langsung telah mencapai kriteria efektif yaitu ≥90%, dengan nilai persentase rata-rata tingkat efektivitas mencapai 148% selama 5 (lima) tahun, meskipun diperiode anggaran tahun 2017 tidak mencapai kriteria tingkat efektivitas ≥90%. Berikut ini merupakan tingkat efektivitas anggaran belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dapat digambarkan dalam bentuk grafik, yaitu;

Grafik Efektivitas Belanja Langsung:



Sumber: Data Diolah (2018)

Grafik 4.2 diatas dapat menggambarkan pergerakan efektivitas belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, disana terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2017 tingkat efektivitas belanja langsung mengalami tingkat efektivitas yang fluktuatif, dan dari perhitungan diatas juga terdapat 1 (satu) periode anggaran yang menunjukkan kriteria kurang efektif atau persentase tidak mencapai 90%. Namun secara keseluruhan tingkat efektivitas dapat dinilai efektif, sebab persentase rata-rata tingkat efektivitas mencapai 148% selama 5 (lima) tahun atau ≥90%.

Analisis Varians

Berikut ini disajikan tabel perhitungan varians belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk tahun anggaran 2013-2017 berdasarkan laporan realisasi anggaran;

Perhitungan Varians Belanja Langsung

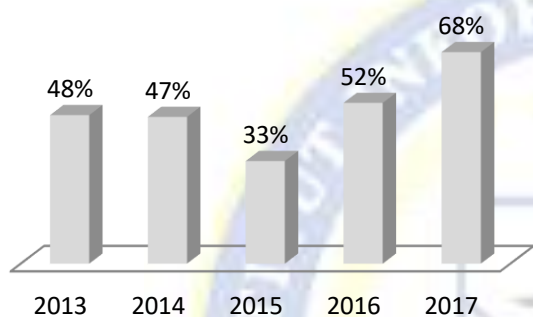
Tahun	Varians = a - b		Selisih	Persentase	Ukuran	Nilai Varians
	Realisasi (a)	Anggaran (b)				
2013	102.291.497.071	196.014.357.350	-93.722.860.279	48%	a < b	Baik
2014	97.010.557.946	183.874.560.000	-86.864.002.054	47%	a < b	Baik
2015	200.754.003.800	299.801.575.000	-99.047.571.200	33%	a < b	Baik
2016	185.558.536.569	384.424.694.000	-198.866.157.431	52%	a < b	Baik
2017	94.989.098.992	297.580.474.000	-202.591.375.008	68%	a < b	Baik
Rata-rata	680.603.694.378	1.361.695.660.350	-681.091.965.972	50%	a < b	Baik

Sumber: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2013-2017). (Data Diolah)

Nilai varians (selisih) anggaran belanja langsung dengan realisasinya berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2013-2017, hasilnya menunjukkan bahwa penyerapan belanja langsung dinilai baik. Pernyataan tersebut berasal dari hasil perhitungan pada tabel diatas yang menunjukkan bahwa anggaran belanja langsung pada tahun 2013 sebesar Rp 196.014.357.350,- dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 102.291.497.071,- atau 53%, sehingga ini menimbulkan selisih sebesar Rp 31.287.843.171 atau 48% yang tidak terealisasi dari total anggaran yang diterima. Anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar Rp 183.874.560.000,- dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 97.010.557.946,- atau 48%, sehingga ini menimbulkan selisih sebesar Rp 86.864.002.054,- atau 47% yang tidak terealisasi dari total anggaran yang diterima. Anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar Rp 299.801.575.000,- dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 200.754.003.800,- atau 67%, sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp

99.047.571.200,- atau 33% yang tidak terealisasi dari total anggaran yang diterima. Kemudian anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar Rp. 384.424.694.000,- dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 185.558.536.569,- atau 48%, sehingga ini menimbulkan selisih sebesar Rp. 198.866.157.431,- atau 52% yang tidak terealisasi dari total anggaran yang diterima. Sedangkan pada tahun anggaran 2017 menunjukkan anggaran belanja langsung sebesar Rp 297.580.474.000,- dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 94.989.098.992,- atau 32% sehingga selisih belanja menjadi sebesar Rp 202.591.375.008,- atau 68% yang tidak terealisasi dari total anggaran yang diterima. Berikut gambar grafik varians;

Grafik Varians Belanja Langsung:



Sumber: Data Diolah (2018)

Grafik diatas dapat menggambarkan nilai varians belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, disana terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan adanya selisih anggaran belanja langsung yang lebih besar daripada realisasinya, meskipun ditahun 2017 mengalami tingginya selisih anggaran belanja langsung yang tidak terealisasi dengan baik.

Analisis Pertumbuhan

Berikut ini disajikan tabel perhitungan pertumbuhan realisasi anggaran belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk tahun anggaran 2013-2017 berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja;

Perhitungan pertumbuhan realisasi anggaran belanja langsung tahun 2013- 2017:

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Pertumbuhan = $\frac{\text{Realisasi } t - \text{Realisasi } t-1}{\text{Realisasi } t-1} \times 100\%$	Kenaikan/ (Penurunan)	Tingkat Pertumbuhan	Ukuran	Kecepatan
2012	87.434.650.483	-	-	-	-	-
2013	102.291.497.071	$\frac{102.291.497.071 - 87.434.650.483}{87.434.650.483} \times 100\%$	14.856.846.588	17%	Positif=Naik	Naik
2014	97.010.557.946	$\frac{97.010.557.946 - 102.291.497.071}{102.291.497.071} \times 100\%$	(5.280.939.125)	-5%	Positif=Naik	Turun
2015	200.754.003.800	$\frac{200.754.003.800 - 97.010.557.946}{97.010.557.946} \times 100\%$	103.743.445.854	107%	Positif=Naik	Naik
2016	185.558.536.569	$\frac{185.558.536.569 - 200.754.003.800}{200.754.003.800} \times 100\%$	(15.195.467.231)	-8%	Positif=Naik	Turun

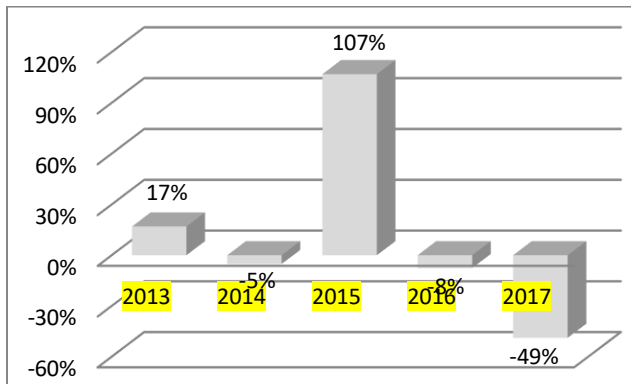
2017	94.989.098.992	$\frac{94.989.098.992 - 190.806.226.033}{190.806.226.033} \times 100\%$	(90.569.437.577)	-49%	Positif=Naik	Turun
Rata-rata				12%	Positif=Naik	Naik

Sumber: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2013-2017).(Data Diolah)

Hasil perhitungan pada tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa pada tahun 2013 realisasi anggaran belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 17% dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja langsung ditahun sebelumnya. Untuk tahun 2014 pertumbuhan realisasi anggaran belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengalami penurunan yang bernilai negatif yaitu sebesar -5%. Akan tetapi di tahun 2015 pertumbuhan realisasi anggaran belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengalami peningkatan yang sangat fantastis dan bernilai positif, yaitu sebesar 107%, ditahun 2015 ini adalah tahun dimana peningkatan dalam merealisasikan anggaran belanja langsung jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun ditahun-tahun setelahnya. Selanjutnya kembali terjadi penurunan pada tahun 2016, yaitu sebesar -8%, dan pada tahun 2017 pula mengalami penurunan yang fantastis dan bernilai negatif, yaitu sebesar -49%. Namun secara keseluruhan tingkat pertumbuhan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengalami peningkatan yaitu dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 12% selama 5 (lima) tahun periode anggaran. Untuk lebih

dapat dilihat pertumbuhan realisasi anggaran belanja langsung berdasarkan gambar grafik berikut ini;

Grafik Pertumbuhan Realisasi Anggaran Belanja Langsung:



Sumber: Data Diolah (2018)

Berdasarkan grafik di atas menggambarkan pertumbuhan realisasi belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan tingkat pertumbuhan yang fluktuatif dibuktikan dengan pola grafik yang naik-turun dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun periode anggaran.

Pembahasan

Proses penyusunan anggaran di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), sebab Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung adalah salah satu Instansi Pemerintah dibidang Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), dengan sumber dana anggaran yang digunakan berasal dari BLU (Badan Layanan Umum), SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang gunanya untuk pembangunan, dan Rupiah Murni. Berdasarkan yang tertulis dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan menyatakan bahwa penyerapan anggaran pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menurutnya sudah baik, dapat dilihat dari realisasi anggarannya, dengan kesimpulan pagu yang diberikan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Setelah melihat berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, yang kemudian dihitung serta dianalisis dengan cermat, berdasarkan persentase dan nominalnya terlihat bahwa benar adanya jika pagu yang diberikan setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun dari sisi lain terlihat bahwa terdapat penyerapan anggaran yang belum sepenuhnya terserap dengan baik, realisasi anggaran belanja langsung paling banyak terjadi di akhir tahun. Sehingga penyerapan anggaran pada anggaran belanja langsung kurang merata. Ketidakeimbangan penyerapan anggaran ini mengakibatkan penyerapan anggaran belanja khususnya pada anggaran belanja langsung terlihat kurang maksimal karena menumpuk di akhir tahun.

Analisis Efisiensi

Menilai tingkat efisiensi realisasi anggaran belanja langsung yang terdapat di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada penelitian ini diukur berdasarkan standar kriteria efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996. Apabila kriteria penilaian $\leq 80\%$ maka realisasi anggaran belanja langsung telah efisien dan sebaliknya jika $\geq 80\%$ maka realisasi anggaran belanja langsung tidak efisien. Hal itu mendukung pendapat Saron (2017) yang menyatakan bahwa semakin kecil angka persentase maka semakin efisien pelaksanaan

anggaran belanja begitu pula sebaliknya, semakin besar angka persentase maka semakin tidak efisien pelaksanaan anggaran belanja. Kriteria efisiensi merupakan bagian yang paling penting dalam pengukuran realisasi anggaran belanja karena penggunaan belanja akan terlihat pada tingkatan ini, dengan adanya kriteria tersebut juga dapat diketahui cara organisasi/instansi dalam memanfaatkan anggarannya sesuai dengan program/kegiatan yang direncanakan dengan menekan biaya yang serendah-rendahnya, atau memaksimalkan tujuan dengan meminimalkan biaya yang dikeluarkan.

Hasil perhitungan yang terdapat pada tabel 4.1, menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berada pada tingkat efisiensi yang telah sesuai dengan kriterianya, karena dengan mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja langsung dapat terlihat bahwa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung telah menyelenggarakan kegiatan belanja langsung dengan penggunaan sumber daya dan menekan biaya yang serendah-rendahnya dari anggaran belanja langsung. Pada periode anggaran tahun 2017 dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk bisa memanfaatkan anggaran dalam menjalankan program dengan baik agar tidak terjadi pemborosan. Namun apabila penyerapan anggaran belanja langsung yang rendah atau dalam penyerapan anggaran belanja langsung memiliki nilai varians yang jauh lebih besar daripada anggarannya, maka bisa mengindikasikan adanya kelemahan dalam merealisasikan anggaran belanja langsung.

Pencapaian realisasi anggaran belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung secara keseluruhan berada dalam kriteria efisien dan telah berusaha melakukan peningkatan efisiensi dalam mengelola anggarannya, yang dibuktikan dengan tingkat efisiensi pada tahun 2013 sampai tahun 2017 berada pada kriteria efisiensi yaitu dibawah 80%, dengan nilai persentase tingkat efisiensi rata-rata 50%. Sehingga hal ini dapat menunjukkan bahwa anggaran belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung telah efisien dan telah mampu menggunakan anggaran yang diperlukan dengan minimal untuk mencapai target yang optimal. Pernyataan ini mendukung pendapat Santoso (2011) yang menyatakan bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan, didalam penelitiannya menunjukkan hasil rata-rata tingkat efisiensi masih rendah, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menjadi objek penelitiannya masih boros dalam menggunakan anggarannya. Sama halnya dengan pernyataan yang telah diberikan oleh Trianto (2014) dalam penelitiannya, yaitu suatu kegiatan dikatakan efisien apabila mencapai hasil yang baik dengan pengorbanan (biaya) biaya yang sedikit, dan didalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa tingkat efisiensi keuangan pada pemerintah daerah yang ditelitinya selama periode 2003-2013 rata-rata berada pada tingkat kurang efisien dan tidak efisien, bahkan pada periode tahun 2009 dan 2013 rasio efisiensi telah melebihi dari angka 80% yang menandakan belanja daerah yang diteliti telah melebihi anggaran yang tersedia

sehingga pengeluaran belanja tersebut dibiayai dengan pinjaman/hutang.

Analisis Efektivitas

Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat efektivitas sebuah anggaran, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan sebuah organisasi/instansi dalam menjalankan program/kegiatan yang telah ditentukan. Tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat berdasarkan realisasi anggaran belanja langsung dengan target anggaran belanja langsung. Hal ini mendukung pendapat Saron (2017) yang menyatakan bahwa Semakin besar realisasi anggaran maka akan semakin tinggi pula persentase tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran.

Hasil perhitungan pada tabel 4.3, berdasarkan standar kriteria efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada anggaran belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terlihat hampir seluruhnya masuk dalam kriteria efektif, namun jika dilihat dengan analisis lebih lanjut, hal tersebut terjadi karena kemampuan penyerapan anggaran belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung memiliki tingkat efektivitas rata-rata $\geq 90\%$ (efektif), hal itu disebabkan karena hasil persentase tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja langsung dari tahun 2013 hingga tahun 2016 telah memenuhi kriteria efektif hasil persentase $\geq 90\%$, yang menunjukkan bahwa dalam menentukan target penerimaan anggaran telah sesuai, dan mampu merealisasikan anggaran yang telah direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensinya, hal ini dibuktikan dengan perolehan anggaran yang lebih besar daripada anggaran awal yang direncanakan. Sedangkan pada tahun 2017 dinilai belum mampu mewujudkan realisasi anggaran belanja langsung dengan optimal dan sesuai target, melainkan target yang hendak dicapai masih jauh dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja langsung yang diperolehnya. Namun secara keseluruhan pencapaian hasil persentase tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja langsung yang diperoleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung telah memenuhi kriteria efektif atau $\geq 90\%$, dengan persentase rata-rata tingkat efektivitas mencapai 148% selama 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Hal ini menyatakan bahwa realisasi anggaran belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sudah mencapai target yang diharapkan.

Tercapainya tingkat efektivitas dengan kriteria efektif menggambarkan bahwa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung telah berhasil menjalankan tugas dengan semestinya, yang dilihat berdasarkan pencapaian target anggaran belanja langsung yang teralisasi. Pernyataan ini mendukung pendapat Santoso (2011) yang menyatakan bahwa efektivitas lebih menitik beratkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, didalam penelitiannya menunjukkan pola perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang diteliti dari tahun 2005-2010 cenderung stabil dengan rata-rata sebesar 94,03% pertahun, dengan demikian berarti tingkat efektivitasnya sudah efektif sebab $\geq 90\%$. Sama halnya

dengan penelitian yang telah dilakukan Trianto (2014) yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan, rata-rata nilai rasio efektivitas keuangan daerah yang diteliti periode tahun 2003-2013 mencapai tingkat yang efektif. Hal ini berarti pemerintah daerah yang diteliti telah berhasil dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dari target yang diperkirakan sebelumnya sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk menunjang pembangunan di daerah tersebut.

Analisis Varians

Anggaran belanja merupakan batas maksimal pengeluaran yang boleh dilakukan instansi pemerintah. Dalam hal ini instansi pemerintah akan dinilai baik dalam penyerapan anggaran belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan, sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya penyerapan anggaran belanja yang kurang baik (Budiman, dan Wokas, 2015). Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pengguna laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varian anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya (Mahmudi, 2010:156).

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3, melalui analisis varians dapat diperoleh hasil bahwa penyerapan anggaran belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung selama tahun anggaran 2013 sampai

tahun 2017 dinilai baik, dan menunjukkan bahwa adanya penghematan anggaran, yang dalam hal ini adalah anggaran belanja langsung. Sebab realisasi belanja langsung tidak melebihi dari anggaran yang ditetapkan. Namun jumlah anggaran yang tidak terrealisasi bisa dilihat dari persentase dan nominalnya yang cukup besar. Dalam melakukan analisis varians anggaran, hendaknya memperhatikan penghematan yang dilakukan berdasarkan angka presentasi, tetapi juga jumlah nominalnya. Semakin sedikit sisa anggaran belanja maka pencapaian dalam penyerapan anggaran belanja di sebuah instansi menjadi semakin baik, namun dalam penyerapannya tidak melebihi dana anggaran yang diperoleh. Dan sebaliknya jika sisa anggaran banyak yang tidak terrealisasi maka pencapaian dalam penyerapan di instansi tersebut menjadi kurang baik karena rencana kerja yang dilakukan dan realisasinya kurang maksimal.

Berdasarkan kriteria penilaian varians yang ditulis oleh Mahmudi (2010: 159) dalam bukunya, maka pada penelitian ini dapat menentukan penilaian varians belanja langsung, hasil perhitungan varians belanja langsung dari tahun 2013 sampai tahun 2017, secara keseluruhan menunjukkan nilai varians belanja langsung dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 50% selisih anggaran belanja langsung yang tidak terealisasi selama 5 (tahun), atau 50% anggaran belanja langsung yang terealisasi selama 5 (lima) tahun. Namun penilaian varians belanja ini melihat baik atau tidak baik dalam pengelolaan keuangan dalam hal ini adalah anggaran belanja langsung. Dengan melihat apakah realisasi belanja langsung \leq anggaran belanja langsung atau

bahkan sebaliknya. Berdasarkan kriteria penilaian varians tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan nilai varians realisasi anggaran belanja langsung \leq anggaran belanja langsung, atau dengan kriteria "Baik". Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Julita (2015) yang menganalisis kinerja pendapatan dan kinerja belanja di instansi daerah yang ditelitinya berdasarkan analisis varians secara umum dapat dikatakan sudah baik. maka pengelolaan keuangannya dapat dinilai baik.

Analisis Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun dan pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Sama halnya seperti yang dijelaskan oleh Mahmudi (2010:160) bahwa realisasi belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik setiap tahun, alasan kenaikan realisasi belanja bisa dikaitkan dengan adanya inflasi, perubahan kurs rupiah, dan penyesuaian faktor ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan belanja disetiap periode anggaran, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada pemerintah selaku *stakeholder*.

Berdasarkan kriteria penilaian pertumbuhan belanja yang ditulis oleh Mahmudi (2010: 159) dalam bukunya, maka pada penelitian ini dapat menentukan penilaian pertumbuhan belanja langsung, hasil perhitungan tingkat pertumbuhan realisasi belanja langsung selama 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai

tahun 2017 terlihat kecenderungan pertumbuhan realisasi belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menunjukkan nilai yang fluktuatif. Penurunan dan peningkatan tersebut dikarenakan adanya jumlah anggaran serta jumlah kegiatan yang jumlahnya berkurang dan bertambah selama tahun 2013 sampai tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya dalam kelompok anggaran belanja langsung. Namun tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 12% atau bernilai positif dengan kriteria "Naik". Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengalami kenaikan sebesar 12% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode anggaran. Hasil penelitian ini mendukung dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ropa (2016) dari hasil perhitungan pertumbuhan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi objek penelitiannya, rasio pertumbuhannya dapat dikatakan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa di atas, maka penulis akan membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut;

- 1) Dengan menganalisis tingkat efisiensi penyerapan anggaran belanja langsung selama periode anggaran tahun 2013-2017, secara keseluruhan telah memenuhi kriteria efisien, yang ditunjukkan dengan rata-rata mencapai 50% atau berada pada nilai kriteria $\leq 80\%$. Hal ini menandakan bahwa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung telah mampu menggunakan minimal anggaran yang diperlukan untuk mencapai target yang optimal.

- 2) Perkembangan tingkat efektivitas anggaran belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dari tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan pencapaian realisasi anggaran yang diperoleh rata-rata mencapai 148% jika disesuaikan dengan standar efektivitas kependagri maka nilai tersebut sudah berada pada kategori sangat efektif. Namun untuk tahun 2017 hanya diperoleh tingkat efektivitas kurang dari 90% atau dalam kriteria kurang efektif, maka dapat dinilai belum mampu melakukan penyerapan anggaran langsung secara baik dan maksimal, atau target yang hendak dicapai masih jauh dibandingkan dengan realisasi anggaran yang diperoleh.
- 3) Dari hasil analisis varians (selisih) anggaran dengan realisasinya, dari tahun 2013-2017 telah mencapai kriteria “baik”, yang artinya dalam merealisasikan anggaran belanja langsung tidak mengalami pemborosan terlihat pada jumlah selisih yang menjelaskan bahwa realisasi belanja langsung \leq anggaran belanja langsung. Varians belanja yang baik yakni realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang ditetapkan serta penyerapan anggaran jangan terlalu rendah akan tetapi tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebab penyerapan anggaran belanja yang rendah bisa mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran yang akan dilaksanakan. Semakin sedikit sisa anggaran maka pencapaian dalam penyerapan anggaran belanja langsung di instansi semakin baik. Sebaliknya jika sisa anggaran banyak maka pencapaian dalam penyerapan suatu instansi kurang baik karena rencana kerja yang dilakukan kurang maksimal.
- 4) Hasil analisis pertumbuhan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 menjelaskan bahwa

realisasi anggaran belanja langsung di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menunjukkan tingkat pertumbuhan yang fluktuatif. Penurunan dan peningkatan ini dikarenakan adanya jumlah anggaran serta jumlah kegiatan yang jumlahnya berkurang dan bertambah selama tahun 2013 sampai tahun 2017 pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya dalam kelompok anggaran belanja langsung.

Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

- 1) Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

Perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran belanja langsung ditahun-tahun selanjutnya, agar pencapaian program dan kegiatan baik pada belanja pegawai, belanja barang/jasa, maupun belanja modal (dalam kelompok belanja langsung) dari tahun ketahun sesuai dengan yang diharapkan dan dapat mencapai tujuan secara optimal, tidak mengalami pemborosan, atau terlalu menghemat anggaran. Anggaran belanja langsung dapat terserap dengan baik, secara efektif dan efisien, dan pergerakan pertumbuhan realisasi anggaran belanja langsung dapat meningkat ditahun-tahun selanjutnya.

Pada tiap-tiap bagian yang akan direncanakan dalam anggaran belanja yang akan diperoleh dan yang akan direalisasikan, agar dapat mengadakan observasi dengan lebih cermat, agar selisih realisasi terhadap anggaran belanja dapat diminimalkan atau ditiadakan sehingga tercapai ke-efektivan anggaran belanja secara keseluruhan. Pengelolaan dana bukan hanya

sekedar mengarah pada penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien, tetapi juga dengan dana tersebut perguruan tinggi harus mampu meningkatkan mutu lulusannya dan mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang lainnya. Dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”.

2) Bagi peneliti selanjutnya;

Apabila ada peneliti lain yang tertarik mengadakan penelitian yang hampir sama, sebaiknya meneliti tentang anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung secara lebih mendalam dan lebih rinci (misalnya anggaran belanja per-triwulan dalam satu periode anggaran atau dalam beberapa periode anggaran), serta dapat meneliti tentang proses jalannya program kegiatan anggaran belanja langsung yang dilakukan, sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Selain menggunakan analisis efisiensi, efektivitas, varians dan tingkat pertumbuhan yang dijadikan sebagai patokan dalam penelitian ini, peneliti menyarankan untuk menambah alat analisis lain seperti analisis aktivitas, analisis kemandirian dan analisis keserasian belanja sebagai pendukung dari analisis diatas, kemudian dapat menggunakan ukuran lain untuk menganalisis dan menentukan hasil penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto, M.Farid. 2015. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.

Anggarini, Yunita dan Puranto, Hendra. 2010. Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif. Yogyakarta.

Azmi, Sayid Abdurrahman dan Jusmani. 2016. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Palembang.

Budiman, Rizal Y. Wokas, Heince. 2015. Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Tiga Daerah Pemekaran di Provinsi Sulawesi Utara.

Danepo, Muhammad. 2013. Pengaruh Partisipasi dalam Penganggaran dan Peran Manajemen Publik Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Objek Penelitian pada SKPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Depdagri. 1997. Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Hisyam, Akhmad. 2012. Pengalokasian Anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009-2011 (Suatu Analisis dengan Pendekatan Alokatif Efisiensi). Depok.

Jauhari. 2017. Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Wilayah Pembayaran Kppn Bandung I Dan Kppn Bandung II. *repository.unpas.ac.id/14526/*. (Tesis).

Julita, S. M. 2015. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada BLH Provinsi Sumatera Utara. (Jurnal).

Kuncoro, Haryo. 2008. Variansi Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*. (jurnal)

- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi sektor publik. Cetakan Pertama. UUI Press. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2013. Pengukuran kinerja sektor publik. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi sektor publik. Andi. Yogyakarta.
- Masruri. 2014. Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM) (Studi kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan Tahun 2010). *Governance and Public Policy*, vol 1 (1) : 53-76.
- Murdayanti, Yunika. 2017. Anggaran Perusahaan. In Media. Jakarta.
- Nordiawan, Deddy dan Hertiaty, Ayuningtyas, 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat.
- Pangkey, Imanuel dan Pinatik, Sherly. 2015. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* 33 Vol.3 No.4.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Status Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2015. Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2006. Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah No. 8. www.sjdih.depkeu.go.id
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21. Tentang Klasifikasi Belanja, Jakarta.
- Permana, Ryan. 2012. Analisis Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Studi Kasus pada Universitas Indonesia. Depok.
- Poerwanto, G.Hendro. 2017. Penganggaran Perusahaan. Yogyakarta.
- Rahardjo, Adisasmita. 2011. Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah, Cetakan Pertama, Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Reski, Kiki. 2012. Efektivitas Pelayanan Perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur. Makassar.
- Ropa, Mega Oktavia. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Manado.
- Santoso, Eko. 2011. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi. Tesis.
- Saron, Yusra. 2017. Analisa Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Tanah Datar. Padang.
- Sinambela, Elizar. 2014. Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara. [Http://jurnal.umsu.ac.id](http://jurnal.umsu.ac.id). (Jurnal).
- Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Sundari, Retno, 2013. Analisis Pengaruh Belanja Langsung Terhadap Capaian Kinerja Instansi Pemerintah. Artikel Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tamasoleng, Adelstin. 2015. Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal*

Riset Bisnis Dan Manajemen Vol. 3. No. 1. 97-110. Universitas Sam Ratulangi.

Trianto, Anton. 2014. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelola Keuangan Daerah di Kota Palembang. Jurnal Akuisisi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan Negara. www.anggaran.depkeu.go.id

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

